



**DRAF AKHIR
RENCANA KERJA
TAHUN 2016**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI RIAU**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2016 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan SKPD yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik terhadap pasar modal dan industri keuangan nonbank semakin meningkat. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI RIAU**

Drs.ARDY BASUKI.M.Si
Pembina Tk.1
NIP .19621016 199203 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	lii
DAFTAR TABEL	lv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2014	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014	6 12 13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	14 24
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	24 26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau	27 39
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	
3.2. Tujuan, Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau	
3.3. Program dan Kegiatan	
BAB IV PENUTUP	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena curahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan masyarakat. Dan kami bersyukur pula bahwa dengan kasih sayang-Nya, kami bisa menyusun salah satu dokumen penting di Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau yaitu Draf Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 sebagai acuan.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan peningkatan kompetensi disektor Sumber Daya yang ada di Provinsi Riau yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu , capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2015.

Besar harapan kami bahwa Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Riau melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Provinsi Riau menjadi Provinsi yang maju dan bermarwah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Draf Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat (BKBPPM) Provinsi Riau untuk Tahun 2015 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala pertimbangan dan masukan kearah perbaikan yang lebih baik sangat kami harapkan.

Demikian Draf Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (BKBPPM) Provinsi Riau untuk Tahun 2015 untuk disampaikan, kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pengambilan kebijakan masa yang akan datang, terimakasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI RIAU

NIZHAMUL,SE,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19681130 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I-i
DAFTAR ISI	I-iii
DAFTAR TABEL	I-iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU TAHUN 2015.	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	II-7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	II-8
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau	II-9
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	III-4
3.3 Program dan Kegiatan	III-5
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau s.d Juni Tahun 2015	II-2
Tabel 2.2	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	II-15
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2016 Dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	III-13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tahun 2016 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, baik dalam program dan kegiatan maupun penganggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tahun 2016 dan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau tahun 2014 - 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2016. Didalamnya terdapat penjabaran visi misi, program dan kegiatan, serta tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

Selain dari pada itu Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tahun 2016 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tahun 2014 - 2018 .

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tahun 2016 dilakukan dengan memperhatikan dokumen RKPD Provinsi Riau. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dengan demikian RKPD Provinsi Riau Tahun 2016 merupakan

acuan dalam penyempurnaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam tahun yang sama, sehingga diharapkan, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tahun 2016 memiliki sinergitas dengan program serta kegiatan Pemerintah Provinsi Riau guna mencapai visi dan misi Pemerintahan Daerah Provinsi Riau.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2016 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437... sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau;
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019;
 11. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau nomor 34 / BKBPPM

/VIII/ 2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Rancana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tahun 2014 - 2019.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2016 disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas yang berhasil guna dan berdaya guna.

Tujuan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2016 disusun dengan tujuan untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2016.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK PROVINSI RIAU TAHUN 2015

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Riau, dan review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2016 Provinsi Riau.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2016.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan uraian antara lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2015

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tahun 2015, diarahkan untuk berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Provinsi Riau dalam segala bidang guna menyiapkan kemandirian masyarakat Riau, adapun realisasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tahun 2015 adalah 16.16 %.

Pada tahun 2015 pencapaian indikatif yang dapat dicapai oleh Badan Kesbangpol Provinsi Riau adalah 50 % dengan asumsi bahwa dalam penyelenggaraan realisasi Renja tidak ada hambatan maupun kesulitan yang dapat menghambat tercapainya target Renja Tahun 2015. Matriks rekapitulasi evaluasi Renja Tahun 2015, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Badan Kesbangpol Provinsi Riau s.d Juni Tahun 2015

Kode	Urusan/Bidang Program/Kegiatan	Target realisasi kinerja Program dan Kegiatan tahun 2015			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Catatan
		Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi %	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.19.01.25	Urusan wajib						
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	12.977.265.000	2.097.061.255	16.16			
	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :	1.397.410.000	516.886.549	36.99			
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	4.123.500	41.24	5.000.000	50	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	255.600.000	132.150.999	51.70	127.800.000	50	
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.000.000	12.430.000	17.26	36.000.000	50	
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	23.500.000	3.000.000	12.77	11.750.000	50	
	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	160.100.000	79.031.000	49.36	80.050.000	50	
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000	23.427.200	46.85	25.000.000	50	
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	8.472.150	21.18	20.000.000	50	
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	8.416.500	56.11	7.500.000	50	
	9. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	153.800.000	14.750.000	9.59	76.900.000	50	
	10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	26.760.000	13.380.000	50.00	13.380.000	50	
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	55.650.000	17.000.000	30.55	27.825.000	50	
	12. Rapat – Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	350.000.000	172.985.200	49.42	175.000.000	50	

	13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	50.000.000	27.720.000	55.44	25.000.000	50	
	14. Publikasi Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat di Provinsi Riau secara Visual Melalui Media TV Online)	135.000.000	0	0	0	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :	395.500.000	69.262.937	17.51			
	1. Pengadaan Peralatan Gedung kantor	97.500.000	0	0	48.750.000	50	
	2. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	148.000.000	7.500.000	5.07	74.000.000	50	
	3. Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	100.000.000	38.717.242	38.72	50.000.000	50	
	4. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	50.000.000	23.045.695	46.09	25.000.000	50	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan :	105.400.000	3.600.000	3.42			
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	95.400.000	0	0	95.400.000	100	
	2. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	10.000.000	3.600.000	36.00	5.000.000	50	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :	358.000.000	40.985.200	11.45			
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	108.000.000	40.985.200	37.95	54.000.000	50	
	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	250.000.000	0	0	0	0	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan :	465.955.000	209.204.575	44.90			
	1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000	33.882.425	33.88	50.000.000	50	
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	50.428.900	0	0	0	0	
	3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	15.526.000	0	0	0	0	
	4. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	100.000.000	50.236.700	50.24	50.000.000	50	
	5. Rapat Koordinasi Pada Setiap SKPD	200.000.000	125.085.450	62.54	100.000.000	50	
	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kegiatan :	1.875.000.000	310.070.800	16.54			

1. Revitalisasi dan (Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Provinsi Riau)	150.000.000	0	0	0	0	
2. Pendidikan Wawasan Kebangsaan	100.000.000	14.786.700	14.79	50.000.000	50	
3. Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Masyarakat	150.000.000	107.560.600	71.71	75.000.000	50	
4. Forum Dialog Penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan	200.000.000	0	0	0	0	
5. Monitoring Evaluasi dan supervisi peningkatan kesadaran belanegara di daerah berdasarkan Permendagri no 38 tahun 2011	150.000.000	43.038.000	28.69	75.000.000	50	
6. Sosialisasi wawasan kebangsaan melalui media massa	100.000.000	0	0	0	0	
7. Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau	150.000.000	0	0	0	0	
8. Identifikasi Sinkronisasi Koordinasi dan update data ketahanan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan se Provinsi Riau	150.000.000	0	0	0	0	
9. Forum Pembauran Kebangsaan bagi etnis masyarakat se Provinsi Riau	175.000.000	144.685.500	82.68	175.000.000	100	
10. Pemantauan supervisi dan evaluasi serta monitoring pelaksanaan ketahanan ideologi	200.000.000	-	-	0	0	
11. Fasilitas dan sosialisasi proses pembauran bagi warga transmigrasi/pengungsi/pendatang di lingkungan provinsi Riau sekaligus Pemberian tanda Penghargaan	200.000.000	-	-	0	0	
12. Penyusunan Kajian Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Penguatan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan Provinsi Riau	150.000.000	-	-	0	0	
Program Fasilitas Kewaspadaan Nasional Kegiatan :	3.210.000.000	454.640.525	14.16			
1. Pengawasan Kegiatan Orang Asing di Daerah	180.000.000	-	-	0	0	
2. Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme	150.000.000	109.869.800	73.25	0	0	
3. Pelatihan Deteksi Dini	140.000.000	19.113.000	13.65	0	0	
4. Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se Provinsi Riau	150.000.000	78.456.025	52.30	75.000.000	50	
5. Penguatan Kelembagaan Komunitas Intelijen Daerah dalam Penanganan Masalah Strategis di Provinsi Riau	500.000.000	-	-	0	0	
6. Rapat Koordinasi dan Identifikasi Paham Radikal Se Provinsi Riau	150.000.000	65.372.250	13.70	75.000.000	50	
7. Investigasi masalah aktual dan aksi unjuk rasa se Provinsi Riau.	500.000.000	17.291.400	3.46	250.000.000	50	
8. Pemetaan Potensi Konflik dan Penanganan Konflik Sosial se Provinsi Riau	420.000.000	0		0	0	

	9. Sosialisasi,Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat	170.000.000	123.341.050	72.55	85.000.000	50	
	10. Penyusunan Fasilitas, Evaluasi,Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan	700.000.000	41.197.000	5.89	350.000.000	50	
	11. Pembinaan Masyarakat Wilayah Perbatasan Terkait Kewaspadaan Nasional	300.000.000	0	0	0	0	
	Program Fasilitas Politik Dalam Negeri Kegiatan :	2.040.000.000	306.765.500	15.04			
	1. Dialog Partai Politik se Provinsi Riau	150.000.000	137.354.800	45.64	75.000.000	50	
	2. Pendidikan Budaya Politik Bagi Elemen Masyarakat dan Partai Politik	400.000.000	107.262.300	10.41	200.000.000	50	
	3. Fasilitas Perkembangan Kapasitas Partai Politik	400.000.000	0	0	0	0	
	4. Monitoring dan Peliputan Pilkada Kab/Kota	300.000.000	16.023.400	5.34	150.000.000	50	
	5. Sosialisasi Peraturan Bantuan Keuangan Partai Politik	140.000.000	0	0	0	0	
	6. Fasilitas Pelaksanaan Komunikasi Politik Terhadap Partai Politik	150.000.000	16.769.400	11.18	75.000.000	50	
	7. Penyusunan Peta Politik Pemilu 2014	100.000.000	14.621.800	14.62	50.000.000	50	
	8. Forum Fasilitas Pemilu dalam rangka Partisipasi Masyarakat	150.000.000	0	0	0	0	
	9. Fasilitas Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan bagal on pemilih pemula	250.000.000	14.733.800	5.89	0	0	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Kegiatan :	700.000.000	103.476.900	14.78			
	1. Identifikasi Ketahanan Ekonomi, Sumber Daya Alam terkait Kewaspadaan Nasional se Provinsi Riau	200.000.000	103.476.900	8,60	100.000.000	50	
	2. Pemantauan Perkembangan Harga Terkait Kewaspadaan Nasional	100.000.000	0	0	0	0	
	3. Forum Koordinasi Peningkatan Peran Pemda dalam pembentukan Lembaga Ekonomi di Daerah	200.000.000	0	0	0	0	
	4. Forum Dialog Konflik Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam	200.000.000	0	0	0	0	

	Program Fasilitas Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat Kegiatan :	2.080.000.000	244.427.062	11.75			
	1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	250.000.000	107.985.012	5.73	125.000.000	50	
	2. Fasilitas Perkembangan Ormas/LSM di Provinsi dan Kabupaten/Kota	300.000.000	36.161.600	12.05	150.000.000	50	
	3. Pembinaan Ormas dan LSM di Provinsi Riau dan Kab/Kota	500.000.000	10.289.200	2.06	250.000.000	50	
	4. Sosialisasi tentang Peraturan Organisasi Masyarakat	300.000.000	15.854.000	5.28	150.000.000	50	
	5. Verifikasi Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	300.000.000	0	0	0	0	
	6. Fasilitas Pertemuan Tokoh Adat, Kesultanan dan Ormas Kebudayaan Provinsi Riau	250.000.000	0	0	0	0	
	7. Koordinasi dan Identifikasi Aliran Sempalan di Provinsi Riau	180.000.000	0	0	0	0	
	Program Pengembangan Data/Informasi Kegiatan :	200.000.000	11.400.000	7.60			
	1. Partisipasi dalam pelaksanaan pameran tahunan	50.000.000	0	0	0	0	
	2. Penyusunan Buku Data Badan Kesbangpollinmas	150.000.000	11.400.000	7.60	75.000.000	50	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Analisis kinerja pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tahun 2015 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik bagi Parpol, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Aparatur yang telah memahami pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini mengandung pengertian bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau sebagai lembaga teknis Pemerintah Daerah Provinsi Riau di bidang kesatuan bangsa dan politik, memiliki tugas untuk menyelenggarakan mediasi, fasilitasi, dan komunikasi bagi institusi masyarakat serta masyarakat itu sendiri untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai betapa pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggung jawab.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat madani (civil society) di bidang pemahaman dan kemampuan komponen masyarakat dalam menjaga dan membangun ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi di Provinsi Riau, terutama dikalangan Ormas/LSM, Tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda di Provinsi Riau.
3. Terselenggaranya pengembangan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Riau, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau memiliki tugas untuk menanamkan nilai-

nilai budaya luhur demi terciptanya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi Riau dalam kondisi yang heterogen (suku, agama, ras, dan antar golongan) dan Penanaman nilai-nilai tersebut akan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara demi NKRI.

4. Terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2015 yang diharapkan berlangsung dengan sukses, aman, dan damai menjadi tolok ukur peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik berkenaan UU bidang politik maupun tata cara mekanisme penyelenggaraan pemilu.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi, agama dan juga situasi pertahanan keamanan yang terus mengalami dinamika. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Provinsi Riau dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, sebagai berikut :

- 1) Pendidikan politik masyarakat masih rendah dapat dilihat dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilu kada di Provinsi Riau serta konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu kada.
- 2) Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah, Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai masalah sosial

politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan, Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum (law enforcement) dan peningkatan demonstrasi yang memprotes kebijakan Pemerintah.

- 3) Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun dapat dilihat dari kecenderungan semakin maraknya conflict and communal violence (Konflik dan Kekerasan Komunal) di tengah masyarakat, seperti tawuran antar warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.
- 4) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan eksese-eksese negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI RIAU

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2016, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau telah tersusun 11 (sebelas) Program yang terjabar dalam 75 kegiatan, seperti dibawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 11) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 12) Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - 13) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
 - 14) Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi Publikasi dan Kehumasan SKPD
 - 15) Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
 - 16) Revisi Standar Operasional Prosedur SKPD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
 - 17) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 18) Pengadaan Meubeler
 - 19) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 20) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - 21) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :
 - 22) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - 23) Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur dengan kegiatan :

24) Pendidikan dan pelatihan formal

25)

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesbangpol Provinsi Riau

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan :

26) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

27) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

28) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

29) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

30) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Jaringan Kesbangpol se Provinsi Riau

31) Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD

32) Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan:

33) Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di lingkungan Provinsi Riau

34) Pendidikan Wawasan Kebangsaan

35) Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara bagi Perempuan

36) Forum Dialog Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan

37) Monitoring Evaluasi dan Supervisi Peningkatan Kesadaran Bela Negara di daerah berdasarkan Permendagri No. 38 Tahun 2011

38) Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Melalui Media Massa

39) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau

40) Forum Pembauran Kebangsaan bagi Etnis Masyarakat se-

Provinsi Riau

- 41) PemantauansuvervisidanEvaluasiserta monitoring
PelaksanaanKetahananPembaurandanKewarganegaraan se-
Provinsi Riau
- 42) FasilitasidanSosialisasiPercepatan proses
PembauranbagiwargaTrasmigrasi/pengungsipendatang di
lingkunganmasyarakat Riau
sekaligusPemberianTandaPenghargaan
- 43) Jambore Bela Negara

7. Program FasilitasKewaspadaanNasionaldengan kegiatan :

- 44) Pengawasan Kegiatan orang Asing di Daerah
- 45) Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme
- 46) Pelatihan Deteksi Dini
- 47) Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini (FKDM)
se Provinsi Riau.
- 49) Rapat Koordinasi dan Identifikasi Paham Radikal se- Provinsi
Riau
- 50) Investigasi Masalah Aktual dan Aksi Unjuk Rasa Se- Provinsi
Riau
- 51) Fasilitas dan Evaluasi Rencana Aksi Terpadu Penanganan
Konflik Sosial Provinsi Riau
- 52) PembinaanMasyarakat Wilayah
PerbatasanterkaitKewaspadaanNasional
- 53)
SosialisasiPencegahandanPenanggulanganPenyakitMasyar
akat.
- 54) Pengembangan Kapasitas Apartur dalam Penanganan Konflik
Sosial Provinsi Riau
- 55) Konsolidasi Pengukuran Ketahanan Nasional Wilayah
di Daerah

8. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri dengan kegiatan :
- 56) Dialog Parpol se-Provinsi Riau
 - 57) Pendidikan Budaya Politik Bagi Elemen Masyarakat
 - 58) Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Partai Politik
 - 59) Sosialisasi Peraturan bantuan Keuangan Partai Politik
 - 60) Fasilitasi Pelaksanaan Komunikasi Politik terhadap Partai Politik
 - 61) Forum Fasilitasi Pemilu Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat
 - 62) Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan bagi Calon Pemilih Pemula
 - 63) Pendidikan Budaya Politik bagi Partai Politik
 - 64) Monitoring dan peliputan PILKADA serentak Kab/kota
9. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dengan kegiatan :
- 65) Identifikasi Ketahanan Ekonomi, Sumber Daya Alam terkait Kewaspadaan Nasional se - Provinsi Riau
 - 66) Pemantauan Perkembangan Harga terkait Kewaspadaan Nasional
 - 67) Forum Koordinasi Peningkatan Peran Pemda dalam Pembentukan Lembaga Ekonomi Daerah
 - 68) Forum Dialog Konflik Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam
10. Program Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat dengan kegiatan :
- 69) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

- 70) Fasilitasi Perkembangan Organisasi Masyarakat di Provinsi dan Kab/Kota
- 71) Pembinaan Ormas dan LSM di Provinsi Riau dan Kab/Kota
- 72) Sosialisasi tentang Peraturan Organisasi Masyarakat
- 73) Fasilitasi Pertemuan Tokoh Adat, Kesultanan dan Ormas Kebudayaan Provinsi Riau.

11. Program Pengembangan Data / Informasi dengan kegiatan :

- 74) Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan
- 75) Penyusunan Buku Data Badan Kesbangpol Provinsi Riau

Matriks perbandingan program dan kegiatan yang telah dirancang dalam RKPD Pemerintah Provinsi Riau 2016 serta kebutuhan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.3.

tabel 2.2.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016

1	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :					
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik				394.560.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik				394.560.000	
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				72.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				72.000.000	
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional				23.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional				23.500.000	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				206.960.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				206.960.000	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				55.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor				55.000.000	
11	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan				45.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan				45.000.000	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor				200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor				200.000.000	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.				27.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.				27.000.000	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman				109.500.000	Penyediaan Makanan dan Minuman				109.500.000	

18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				550.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				550.000.000
19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor				73.920.000	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor				73.920.000
22	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi Publikasi dan Kehumasan SKPD				200.000.000	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi Publikasi dan Kehumasan SKPD				200.000.000
36	Verifikasi,Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial				250.000.000	Verifikasi,Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial				250.000.000
134	Revisi Standar Operasional Prosedure SKPD				100.000.000	Revisi Standar Operasional Prosedure SKPD				100.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				100.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				100.000.000
10	Pengadaan Meubeler				150.000.000	Pengadaan Meubeler				150.000.000
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor				200.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor				200.000.000
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil Jabatan				100.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil Jabatan				100.000.000
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				60.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				60.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				95.400.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				95.400.000
06	Pembinaan fisik dan mental Aparatur				50.000.000	Pembinaan fisik dan mental Aparatur				50.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal				50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal				50.000.000
66	Capacity Building dilingkungan SKPD				250.000.000	Capacity Building dilingkungan SKPD				250.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
01	PenyusunanLaporanCapaianKinerjadanIkhtisarRealisasi Kinerja SKPD				200.000.000	PenyusunanLaporanCapaianKinerjadanIkhtisarRealisasi Kinerja SKPD				200.000.000

02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran				15.526.100	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran				15.526.100
04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				55.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				55.000.000
05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD				150.000.000	Penyusunan Rencana Kerja SKPD				150.000.000
06	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Jaringan Kesbangpol se Provinsi Riau				350.000.000	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Jaringan Kesbangpol se Provinsi Riau				350.000.000
45	Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD				100.000.000	Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD				100.000.000
52	Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				100.000.000	Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				100.000.000
	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				2.426.000.000	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				2.426.000.000
01	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - nilai Pancasila di lingkungan Provinsi Riau				150.000.000	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - nilai Pancasila di lingkungan Provinsi Riau				150.000.000
02	Pendidikan Wawasan Kebangsaan				100.000.000	Pendidikan Wawasan Kebangsaan				100.000.000
03	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Perempuan				150.000.000	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Perempuan				150.000.000
04	Forum Dialog Penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan				200.000.000	Forum Dialog Penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan				200.000.000
05	Monitoring Evaluasi dan supervisi peningkatan kesadaran bela negara di daerah berdasarkan permendagri no 38 tahun 2011				150.000.000	Monitoring Evaluasi dan supervisi peningkatan kesadaran bela negara di daerah berdasarkan permendagri no 38 tahun 2011				150.000.000
06	Sosialisasi wawasan kebangsaan melalui media massa				100.000.000	Sosialisasi wawasan kebangsaan melalui media massa				100.000.000
07	Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Prov Riau				150.000.000	Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Prov Riau				150.000.000
09	Forum Pembauran Kebangsaan bagi etnis masyarakat se Provinsi Riau				150.000.000	Forum Pembauran Kebangsaan bagi etnis masyarakat se Provinsi Riau				150.000.000
10	Pemantauan supervisi dan evaluasi serta monitoring pelaksanaan ketahanan ideologi pembauran dan kewarganegaraan se Provinsi Riau				100.000.000	Pemantauan supervisi dan evaluasi serta monitoring pelaksanaan ketahanan ideologi pembauran dan kewarganegaraan se Provinsi Riau				100.000.000

11	Fasilitasi dan Sosialisasi percepatan proses pembauran bagi warga transmigrasi/ pengungsi pendatang di lingkungan masyarakat Riau sekaligus pemberian tanda penghargaan Jambore Bela Negara				397.810.000	Fasilitasi dan Sosialisasi percepatan proses pembauran bagi warga transmigrasi/ pengungsi pendatang di lingkungan masyarakat Riau sekaligus pemberian tanda penghargaan Jambore Bela Negara				397.810.000
17					150.000.000					150.000.000
	Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional				3.660.000.000	Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional				3.660.000.000
01	Pengawasan Kegiatan orang Asing di Daerah Provinsi Riau				142.890.000	Pengawasan Kegiatan orang Asing di Daerah Provinsi Riau				142.890.000
02	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme Provinsi Riau				150.000.000	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme Provinsi Riau				150.000.000
03	Pelatihan Deteksi Dini				150.000.000	Pelatihan Deteksi Dini				150.000.000
04	Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Se Provinsi Riau				150.000.000	Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Se Provinsi Riau				150.000.000
06	Rapat Koordinasi dan Identifikasi Paham Radikal Se Provinsi Riau				150.000.000	Rapat Koordinasi dan Identifikasi Paham Radikal Se Provinsi Riau				150.000.000
07	Investigasi masalah actual dan aksi-aksi unjuk rasa Provinsi Riau				200.000.000	Investigasi masalah actual dan aksi-aksi unjuk rasa Provinsi Riau				200.000.000
10	Pembinaan Masyarakat Wilayah Perbatasan terkait Kewaspadaan Nasional				250.000.000	Pembinaan Masyarakat Wilayah Perbatasan terkait Kewaspadaan Nasional				250.000.000
11	Sosialisasi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat				150.000.000	Sosialisasi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat				150.000.000
12	Pengembangan Kapasitas Aparatur dalam penanganan konflik sosial Provinsi Riau				450.000.000	Pengembangan Kapasitas Aparatur dalam penanganan konflik sosial Provinsi Riau				450.000.000
13	Fasilitasi, dan Evaluasi Rencana Aksi Terpadu Penanganan konflik sosial Provinsi Riau				650.000.000	Fasilitasi, dan Evaluasi Rencana Aksi Terpadu Penanganan konflik sosial Provinsi Riau				650.000.000
14	Konsolidasi Pengukuran Ketahanan Nasional Wilayah di Daerah				400.000.000	Konsolidasi Pengukuran Ketahanan Nasional Wilayah di Daerah				400.000.000
	Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri				2.240.000.000	Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri				2.240.000.000
01	Dialog Partai politik Se-Prov Riau				150.000.000	Dialog Partai politik Se-Prov Riau				150.000.000
03	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Partai Politik				201.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Partai Politik				201.000.000

05	Sosialisasi Peraturan bantuan Keuangan Partai Politik			140.000.000	Sosialisasi Peraturan bantuan Keuangan Partai Politik			140.000.000
06	Fasilitasi Pelaksanaan Komunikasi Politik terhadap Partai Politik			343.420.000	Fasilitasi Pelaksanaan Komunikasi Politik terhadap Partai Politik			343.420.000
08	Forum Fasilitasi Pemilu dalam rangka Partisipasi masyarakat			150.000.000	Forum Fasilitasi Pemilu dalam rangka Partisipasi masyarakat			150.000.000
09	Fasilitasi Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan bagi calon pemilih pemula			300.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan bagi calon pemilih pemula			300.000.000
11	Pendidikan Budaya Politik Bagi Elemen Masyarakat.			275.000.000	Pendidikan Budaya Politik Bagi Elemen Masyarakat.			275.000.000
12	PendidikanBudayaPolitikbagiPartai Politik			275.000.000	PendidikanBudayaPolitikbagiPartai Politik			275.000.000
13	Monitoring & Peliputan PILKADA serentakKab/Kota			165.000.000	Monitoring & Peliputan PILKADA serentakKab/Kota			165.000.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi			750.000.000	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi			750.000.000
01	Identifikasi Ketahanan Ekonomi, Sumber Daya Alam, terkait Kewaspadaan Nasional se-Provinsi Riau			200.540.000	Identifikasi Ketahanan Ekonomi, Sumber Daya Alam, terkait Kewaspadaan Nasional se-Provinsi Riau			200.540.000
02	Pemantauan Perkembangan Harga terkait kewaspadaan nasional			173.500.000	Pemantauan Perkembangan Harga terkait kewaspadaan nasional			173.500.000
03	Forum Koordinasi Peningkatan Peran Pemda dalam Pembentukan Lembaga Ekonomi di Daerah			200.000.000	Forum Koordinasi Peningkatan Peran Pemda dalam Pembentukan Lembaga Ekonomi di Daerah			200.000.000
04	Forum dialog Konflik Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam			200.000.000	Forum dialog Konflik Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam			200.000.000
05	Pendataan Sumber Daya Alam yang Berpotensi konflik dalam rangka ketahanan Ekonomi			219.000.000	PendataanSumberDayaAlam yang Berpotensi konflik dalam rangka ketahanan Ekonomi			219.000.000
	Program Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan			2.080.000.000	Program Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan			2.080.000.000
01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama			250.000.000	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama			250.000.000
02	Fasilitasi Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi dan kabupaten/Kota			150.000.000	Fasilitasi Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi dan kabupaten/Kota			150.000.000

03	Pembinaan Ormas dan LSM di Provinsi Riau dan Kab/Kota				200.000.000	Pembinaan Ormas dan LSM di Provinsi Riau dan Kab/Kota				200.000.000	
06	Fasilitasi Pertemuan Tokoh adat,kesultanan dan Ormas Kebudayaan Provinsi Riau				150.000.000	Fasilitasi Pertemuan Tokoh adat,kesultanan dan Ormas Kebudayaan Provinsi Riau				150.000.000	
07	Koordinasi Identifikasi Aliran Sempalan di Provinsi Riau				180.000.000	Koordinasi Identifikasi Aliran Sempalan di Provinsi Riau				180.000.000	

,

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Riau selain mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi juga merujuk pada kebijakan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Pada rencana tindak pembangunan Kementerian/Lembaga tahun 2015, Dirjen Kesbangpoldagri Kemendagri RI memiliki 1 (satu) program yaitu Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik. Di dalamnya terdapat 6 (enam) kegiatan prioritas yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan indikator kinerja berkaitan dengan urusan administrasi internal, serta koordinasi aparat Kesbang se-Indonesia.
2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang diarahkan pada pengembangan nilai wawasan kebangsaan dan pembauranbangsa serta pendidikan kewarganegaraan.
3. Kewaspadaan Nasional yang diarahkan kepada manajemen konflik, penanganan dan penyelesaian konflik, dokumen laporan situasi kondisipolitik se-Indonesia, serta penyusunan rumusan kebijakan nasional berkenaan dengan kewaspadaan nasional.
4. Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan indikator kinerja diarahkan pada :
 - a. Fungsi, peran, koordinasi, dan fasilitasi berkenaan dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan (seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan) dan forum publik,

penanganan masalah sosial, serta perumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan-kebijakan berkenaan dengan ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan.

b. Ketahanan Ekonomi dengan indikator kinerja diarahkan pada penyusunan rumusan kebijakan berkaitan dengan ketahanan ekonomi, fasilitasi, kerja sama, pembinaan, dan pengembangan ketahanan ekonomi, serta laporan stabilitas ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat.

5. Politik Dalam Negeri yang diarahkan pada pemilihan umum, partisipasi dan komunikasi politik, lembaga perwakilan, laporan dan pemantauan perkembangan politik dalam negeri, pendidikan politik masyarakat, serta penyusunan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan politik dalam negeri.

Merujuk pada kegiatan – kegiatan yang ada pada Dirjen KesbangpolKemendagri RI, Badan Kesbangpol Provinsi Riau mencoba untuk menerapkan beberapa kebijakan yang sekiranya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di Riau yaitu sebagai berikut :

1. Kesekretariatan dengan indikator kinerja diarahkan sebagai penunjang penyelenggaraan administrasi badan serta pemenuhan sarana dan prasarana badan serta penyelenggaraan koordinasi badan/kantor kesbangpol kab/kota di Provinsi Riau.
2. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan indikator kinerja diarahkan pada pembinaan dan pengembangan ideologi Negara dan bela Negara serta wawasan

kebangsaan dan pembauran bangsa. Kedua hal ini meliputi fasilitasi FKUB, FPK, FKDM dan sosialisasi ideologi Negara dan bela Negara serta wawasan dan pembauran kebangsaan bagi masyarakat, serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional maupun daerah berkenaan dengan ideologi Negara dan bela Negara serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.

3. Kewaspadaan Nasional yang difokuskan pada kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik dan pengawasan orang asing yang meliputi manajemen konflik, penanganan dan penyelesaian konflik, dokumen laporan situasi kondisi politik daerah di Riau, pendataan dan pengawasan serta pemantauan orang asing, serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah berkaitan dengan situasi dan kondisi ipoleksosbudhankam.
4. Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan indikator kinerja diarahkan pada ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi serta ketahanan seni, budaya, agama kepercayaan dan organisasi kemasyarakatan meliputi penyelenggaraan fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
5. Politik Dalam Negeri dengan indikator kinerja diarahkan pada fasilitasi partai politik dan pemilihan umum serta fasilitasi kelembagaan dan pendidikan politik, laporan dan pemantauan perkembangan politik dalam negeri, pendidikan politik masyarakat, serta penyusunan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan politik dalam negeri di Provinsi Riau

1.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU.

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2016 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2014-2019. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2016 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :

- a. Menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi yang bermartabat dalam hal ini menitikberatkan pada kebijakan menggunakan hak-hak konstitusional (hak sipil dan hak politik) sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang
- b. Mengantisipasi sejak dini potensi-potensi konflik berupa kondisi laten dan aktual dalam interaksi sosial masyarakat yang dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap pihak lain (sikap/perlakuan, kebijakan)
- c. Meningkatkan sikap nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesadaran bela negara di kalangan masyarakat
- d. Meningkatkan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan masyarakat
- e. Memberdayakan dan memperkuat peran lembaga-lembaga non pemerintah (LSM/Orkemas, FPK, FKUB dan FKDM) untuk mendukung akselerasi pembangunan daerah

2. Sasaran

- a. Tumbuhnya nilai-nilai demokrasi yang bermartabat dengan semakin bijaknya masyarakat dalam menggunakan hak politik dan hak sipilnya.
- b. Terdeteksinya kondisi-kondisi laten dan aktual dalam interaksi sosial masyarakat yang berpotensi menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap pihak lain (sikap/perilaku, kebijakan) guna meminimalisasi konflik sosial.
- c. Meningkatkan sikap nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan serta kesadaran bela Negara di kalangan masyarakat.
- d. Meningkatnya ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama, dan masyarakat.
- e. Meningkatkan kapasitas LSM/Orkemas, FPK, FKDM dan FKUB dalam menunjang pembangunan daerah

1.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019 menetapkan visi Riau : "Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja Serta Pemantapan Aparatur" yang memuat misi dan yang terkait langsung dengan tugas pokok, fungsi dan visi, misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah Misi kelima, "Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik".

Untuk mendukung tercapainya visi dan terselenggaranya misi Pemerintah Provinsi Riau, Badan Kesbangpol Provinsi Riau menetapkan visi "Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Suasana Yang Kondusif di Provinsi Riau" dengan misi :

Misi Pertama : Meningkatkan kualitas demokrasi, diarahkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan demokrasi yaitu perwujudan nilai-nilai demokrasi yang bermartabat, beretika, dan berlandaskan nilai – nilai budaya lokal.

Misi Kedua : Menciptakan stabilitas daerah yang aman, tertib dan kondusif, merupakan satu upaya dalam melaksanakan pencegahan potensi konflik dan peningkatan pencegahan penyakit-penyakit masyarakat.

Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan, diarahkan pada peningkatan kualitas pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Misi Keempat: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan percepatan pembangunan Provinsi Riau, diarahkan untuk mengerakkan seluruh komponen dan elemen masyarakat baik LSM, Orkemas, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),

sebagai mitra pemerintah dalam mensukseskan percepatan pembangunan di Provinsi Riau.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau telah menyusun 11 (sebelas) program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatannya :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 9) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
- 10) Revisi Standar Operasional Prosedur SKPD
- 11) Penyediaan Jasa sosialisasi, informasi publikasi dan kehumasan SKPD
- 12) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- 13) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 14) Rapat – Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- 15) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
- 16) Verifikasi, Evaluasi dan monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.

2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur dengan kegiatannya :
 - 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
 - 5) Pengadaan Mebeleur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur kegiatannya adalah :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - 2) Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kegiatannya adalah :
 - 1) Pendidikan dan pelatihan formal
 - 2) Capacity Building di Lingkungan SKPD

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan kegiatannya adalah :
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
 - 3) Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD
 - 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 - 5) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - 6) Rapat Koordinasi pada setiap SKPD

- 7) Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
-
6. Program Fasilitas Kewaspadaan Nasional kegiatannya adalah :
 - 1) Pengawasan Kegiatan orang Asing di Daerah
 - 2) Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme
 - 3) Pelatihan Deteksi Dini
 - 4) Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Se Provinsi Riau
 - 5) Pengembangan Kapasitas Aparatur Dalam Penanganan Konflik Sosial.
 - 6) Rapat Koordinasi dan Identifikasi Paham Radikal se Provinsi Riau
 - 7) Investigasi masalah aktual dan aksi-aksi unjuk rasa se Provinsi Riau
 - 8) Konsolidasi Pengukuran Ketahanan Nasional Wilayah di Daerah
 - 9) Fasilitas, dan Evaluasi Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik social Provinsi Riau
 - 10) Pembinaan Masyarakat Wilayah Perbatasan terkait Kewaspadaan Nasional
 - 11) Sosialisasi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat

 7. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatannya :
 - 1) Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Provinsi Riau
 - 2) Pendidikan Wawasan Kebangsaan

- 3) Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara bagi Perempuan
 - 4) Forum dialog penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan
 - 5) Monitoring evaluasi dan supervisi peningkatan kesadaran bela negara di daerah berdasarkan Permendagri no 38 tahun 2011
 - 6) Sosialisasi wawasan kebangsaan melalui media massa
 - 7) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau
 - 8) Forum Pembauran Kebangsaan bagi etnis masyarakat se Provinsi Riau
 - 9) Pemantauan supervisi dan evaluasi serta monitoring pelaksanaan ketahanan ideologi pembauran dan kewarganegaraan se Provinsi Riau
 - 10) Fasilitas dan Sosialisasi percepatan Proses Pembauran bagi warga transmigrasi/pengungsi pendatang di lingkungan masyarakat Riau.
 - 11) Jambore Bela Negara
8. Program Fasilitas Politik Dalam Negeri
- 1) Dialog Partai politik se Provinsi Riau
 - 2) Pendidikan Budaya Politik Bagi Elemen Masyarakat
 - 3) Pendidikan Budaya Politik bagi Partai Politik.
 - 4) Fasilitas Pengembangan Kapasitas Partai Politik
 - 5) Monitoring & Supervisi Persiapan Pelaksanaan Pilkada serentak Kab/Kota.
 - 6) Sosialisasi Peraturan bantuan Keuangan Partai Politik
 - 7) Fasilitas Pelaksanaan Komunikasi Politik terhadap Partai Politik
 - 8) Forum Fasilitas Pemilu dalam rangka partisipasi masyarakat
 - 9) Fasilitas Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan bagi calon pemilih pemula

9. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi kegiatannya adalah :

- 1) Identifikasi Ketahanan Ekonomi, Sumber Daya Alam, terkait Kewaspadaan Nasional se-Provinsi Riau
- 2) Pemantauan Perkembangan Harga terkait kewaspadaan Nasional
- 3) Forum Koordinasi Peningkatan Peran Pemdada dalam Pembentukan Lembaga Ekonomi di Daerah
- 4) Forum Dialog Konflik Sumber Daya Ekonomi dan SDA

10. Program Fasilitas Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat kegiatannya adalah :

- 1) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
- 2) Fasilitas Perkembangan Organisasi Masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 3) Pembinaan Ormas dan LSM di Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota
- 4) Fasilitas Pertemuan Tokoh Adat, Kesultanan dan Ormas Kebudayaan Provinsi Riau
- 5) Koordinasi Identifikasi Aliran Sempal di Provinsi Riau

11. Program Pengembangan Data / Informasi dengan kegiatan :

- 1) Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan
- 2) Penyusunan Buku Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

Program dan kegiatan pada tahun 2016 tersebut sesuai dengan program serta kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2015.

Hal ini memperlihatkan adanya sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi Riau sehingga Penyelenggaraan Pelayanan dapat dilakukan secara menyeluruh.

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 merupakan Dokumen Rencana Tahunan. Penetapan program dan kegiatan telah mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 serta diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015.

Untuk itu dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2016, masing – masing Bidang dalam Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dan Institusi yang menanganitugas Kes Riau berpedoman kepada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerjanya, demi terciptanya sinergitas pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang diharapkan.

Penyusunan rencana biaya pelaksanaan program dan kegiatan kiranya mempertimbangkan efisiensi secara rasional dan proporsional karena pagu anggaran yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu perlu disusun prioritas

program dan kegiatan sesuai aspek – aspek yang dinilai strategis dan program yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Disamping hal tersebut disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi dan konsultasi dengan pendekatan secara formal maupun non formal dan yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan bagi masyarakat dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6				
06	PerencanaanPembangunan								
06 15	Program Pengembangan Data/Informasi								
06 1 19 40	PenyusunanBuku Data BadanKesbangpol	Tersedianya Data BadanKesbangpol se Provinsi Riau	Provinsi Riau	100 buku	200.000.000	APBD		100 buku 200.000.000	
	6 PartisipasiDalamPelaksanaanPameranTahunan	Terlaksananya keikutsertaan Kesbangpol pada Pameran Riau Ekpo	Pekanbaru	1 keg	150.000.000	APBD		1 keg 150.000.000	
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
19 2	Belanja Langsung								
19 2 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
19 2 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Jasa surat Menyurat.	Pekanbaru	12 bulan	10.000.000	APBD		12 bulan 30.000.000	
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya biaya kebutuhan komunikasi,air dan listrik	Pekanbaru	12 bulan	394.560.000	APBD		12 bulan 394.560.000	
	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pelayanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	6 jenis	72.000.000	APBD		6 jenis 75.000.000	
	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pelayanan jasa pengurusan perizinan kendaraan	Pekanbaru	16 unit	23.500.000	APBD		16 unit 25.000.000	
	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya pelayanan jasa dan kebutuhan kebersihan kantor	Pekanbaru	13 ruangan	206.960.000	APBD		13 ruangan 206.960.000	
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis Kantor	Pekanbaru	50 jenis	55.000.000	APBD		50 jenis 55.000.000	
	11 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Terlaksananya pelayanan cetakan dan penggandaan	Pekanbaru	23 jenis	45.000.000	APBD		23 jenis 50.000.000	
	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya pelayanan penerangan kantor	Pekanbaru	21 jenis	30.000.000	APBD		21 jenis 20.000.000	

			13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Pekanbaru	6 jenis	200.000.000	APBD		6 jenis	300.000.000
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Tersedianyan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pekanbaru	5 jenis	27.000.000	APBD		5 jenis	27.000.000
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Pekanbaru	12 bulan	109.500.000	APBD		12 bulan	109.500.000
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi	Provinsi Riau	12 kab/kota dan Ibu kota	550.000.000	APBD		12 kab/kota dan Ibu kota	750.000.000
			19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Pekanbaru	4 org	73.920.000	APBD		4 org	73.920.000
			22	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi Publikasi dan Kehumasan SKPD	Tersedianya Jasa Sosialisasi, Informasi Publikasi dan Kehumasan	Pekanbaru	12 bulan	200.000.000	APBD		12 bulan	150.000.000
			36	Verifikasi,Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya Verifikasi,Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	Provinsi Riau	59 kali	250.000.000	APBD		59 kali	250.000.000
			134	Revisi Standar Operasional Prosedure SKPD	Tersedianya Standar Operasional Prosedure SKPD yang telah di revisi	Pekanbaru	1 dok	100.000.000	APBD		1 dok	0
19	2	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
19	2	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Pekanbaru	1 keg	100.000.000	APBD		1 keg	150.000.000
			10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya meubeler	Pekanbaru	3 jenis	150.000.000	APBD		3 jenis	155.000.000
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	Pekanbaru	12 bulan	200.000.000	APBD		12 bulan	300.000.000
			23	Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil Jabatan	Tersedianya pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pekanbaru	1 unit	100.000.000	APBD		1 unit	125.000.000
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas	Pekanbaru	3 unit	60.000.000	APBD		5 unit	65.000.000
19	2	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
19	2	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pekanbaru	180 stell	95.400.000	APBD		180 stell	95.400.000
			06	Pembinaan fisik dan mental Aparatur	Terlaksananya Pembinaan fisik dan mental Aparatur	Pekanbaru	12 bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	50.000.000
19	2	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
19	2	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Provinsi Riau	12 bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	55.000.000
			66	Capacity Building dilingkungan SKPD	Terlaksananya peningkatan	Provinsi	100 org	250.000.000	APBD		100 org	265.000.000

					kapasitas sumber daya aparatur	Riau						
19	2	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
19	2	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penja ,LAKIP,LKPJ, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan	Provinsi Riau	6 Dok	200.000.000	APBD		6 Dok	250.000.000
			02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan keuangan semester dan akhir tahun	Provinsi Riau	1 dok	15.526.100	APBD		1 Dok	15.526.100
			04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	Provinsi Riau	1 dok	55.000.000	APBD		1 dok	55.000.000
			05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Renja 2016	Provinsi Riau	1 dok	150.000.000	APBD		1 dok	150.000.000
			06	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Jajaran Kesbangpol se Provinsi Riau	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Jajaran Kesbangpol se Provinsi Riau	Pekanbaru	2 Rekomendasi	350.000.000	APBD		2 Rekomendasi	350.000.000
			45	Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD		Provinsi Riau	1 dok	100.000.000	APBD		1 dok	
			52	Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersedianya PK dan RKT	Pekanbaru	1 dok	100.000.000	APBD		1 dok	100.000.000
19	2	25		Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				2.426.000.000				
			01	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - nilai Pancasila di lingkungan Provinsi Riau	Penguatan nilai-nilai Pancasila di Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Provinsi Riau	50 org	150.000.000	APBD		50 org	150.000.000
			02	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Penguatan Kelembagaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Provinsi Riau	12 kab/kota	100.000.000	APBD		12 kabkota	132.070.000
			03	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Perempuan	meningkatkan pemahaman kesadaran Bela Negara khususnya perempuan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari	Provinsi Riau	200 org	150.000.000	APBD		200 org	150.000.000
			04	Forum Dialog Penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan	Terlaksananya forum dialog penguatan nilai-nilai sejarah	Provinsi Riau	200 org	200.000.000	APBD		200 org	200.000.000

					kebangsaan bagimasyarakat se Provinsi Riau						
			05	Monitoring Evaluasi dan suvervisi peningkatan kesadaran bela negara di daerah berdasarkan permendagri no 38 tahun 2011	terlaksananya monitoring Evaluasidansuervisikegiatanpening katankesadaranbela negara di daerah berdasarkan Permendagri no 38 tahun 2011	Provinsi Riau	12 kab/kota	150.000.000	APBD		12 kab/kota 150.000.000
			06	Sosialisasi wawasan kebangsaan melalui media massa	tersosialisasinya wawasan kebangsaan	Provinsi Riau	200 org	100.000.000	APBD		200 org 100.000.000
			07	Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Prov Riau	Tersedianya Data indeks Demokrasi Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 dok 150.000.000
			09	Forum Pembauran Kebangsaanbagi etnis masyarakat se Provinsi Riau	terwujudnya wahana kerukunan antarwargamasyarakatsertamenam bahwawasan danpengetahuanhimpunanmasyara kattentangkebangsaan	Provinsi Riau	150 org	150.000.000	APBD		150 org 150.000.000
			10	Pemantauan suvervisi dan evaluasi serta monitoring pelaksanaan ketahanan ideologi pembauran dan kewarganegaraan se Provinsi Riau	Terlaksananyahasilsuvervisidaneval uasiserta monitoring pelaksanaanketahananideologipem baurandanKewarganegaraan se Provinsi Riau	Provinsi Riau	12 kab/kota	100.000.000	APBD		12 kab/kota 100.000.000
			11	Fasilitasi dan Sosialisasi percepatan proses pembauran bagi warga transmigrasi/ pengungsi pendatang di lingkunganmasyarakat Riau sekaligus pemberian tanda penghargaan	Terwujudnyahubungangharmonis danpemahamankerukunanbagiwar gatransmigrasi/pengungsi/ pendatang di Prov.Riau	Provinsi Riau	12 kab/kota	397.810.000	APBD		12 kab/kota 200.000.000
			17	JamboreBela Negara	Terlaksananya peringatan Hari Bela Negara tahun 2016	Provinsi Riau	1 keg	150.000.000	APBD		1 keg 150.000.000
19	2	26		Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional				3.660.000.000			3.870.000.000
			01	Pengawasan Kegiatan orang Asing di Daerah Provinsi Riau	Pemantauandanpengawasan orang asing,tenagakerjaasing, danorganisasiasing	Provinsi Riau	1 Dokumen	142.890.000	APBD		1 dok 200.000.000
			02	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme Provinsi Riau	Pemahamanmasyarakatdanaparatu rterhadapbahayaterorisme	Provinsi Riau	85 org	150.000.000	APBD		85 org 150.000.000
			03	Pelatihan Deteksi Dini	Meningkatnyasumberdayaaparatur dalampendeteksidinerhadapbaha yadilingkunganmasyarakat	Pekanbaru	50 org	150.000.000	APBD		50 org 150.000.000
			04	Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Se Provinsi Riau	Forum KewaspadaanDiniMasyarakat se Provinsi Riau	Provinsi Riau	80 org	150.000.000	APBD		80 org 150.000.000
			06	Rapat Koordinasi dan Identifikasi Paham	Rakordanmendatapahamradikaldi	Provinsi	1 dok	150.000.000	APBD		1 dok 150.000.000

			Radikal Se Provinsi Riau	daerah	Riau						
		07	Investigasi masalah actual dan aksi-aksi unjuk rasa Provinsi Riau	Pemantauandanpelaporanaksidem ontrasiunjuk rasa, aksi kekerasan kepada pemerintah dan kepada perusahaan dan sesama masyarakat	Provinsi Riau	12 bulan	200.000.000	APBD		12 bln	500.000.000
		10	Pembinaan Masyarakat Wilayah Perbatasan terkait Kewaspadaan Nasional	Meningkatnyakewaspadaanmasyarakat di daerahperbatasan	Meranti, Inhil	220 org	250.000.000	APBD		100%	350.000.000
		11	Sosialisasi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Meningkatnyapemahaman generasi muda Terhadapbahayapekat	Provinsi Riau	150 org	150.000.000	APBD		100%	200.000.000
		12	PengembanganKapasitasAparaturdalam penanganan konflik sosial Provinsi Riau	Terpetanya daerah rawan konflik di Provinsi Riau	Provinsi Riau	12 bln	450.000.000	APBD		12 bln	150.000.000
		13	Fasilitasi, danEvaluasi Rencana Aksi TerpaduPenanganankonflik social Provinsi Riau	TerlaksananyaKegiatan Tim terpaduProvinsi Riau dalamPenanganan	Provinsi Riau	1 Dokumen	650.000.000	APBD		1 dok	1.000.000.000
		14	KonsolidasiPengukuranKetahananNasional Wilayah di Daerah	MeningkatnyaeksistensiKomindadalamPenangananmasalahstrategis di Provinsi Riau	Provinsi Riau	1Dokumen	400.000.000	APBD		1 Dok	300.000.000
19	2	27	Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri				2.240.000.000				2.500.000.000
		01	Dialog Partai politik Se-Prov Riau	PenyaluranAspirasiMasyarakatmelalui partai politik	Pekanbaru	90 org	150.000.000	APBD		90 org	150.000.000
		03	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Partai Politik	TersaluranyaBantuanKeuanganPartai Politik	Provinsi Riau	12 Parpol	201.000.000	APBD		12 Parpol	400.000.000
		05	Sosialisasi Peraturan bantuan Keuangan Partai Politik	MeningkatnyaPemahamanPartaipolitikdalam bantuan keuangan Partai	Provinsi Riau	60 org	140.000.000	APBD		60 org	0
		06	Fasilitasi Pelaksanaan Komunikasi Politik terhadap Partai Politik	Terlaksananyafasilitasipelaksanaan KomunikasiPolitikterhadapPartaiPolitik agama	Pekanbaru	60 org	343.420.000	APBD		60 org	200.000.000
		08	Forum Fasilitasi Pemilu dalam rangka Partisipasi masyarakat	FasilitasiKoordinasipelaksanaan Tahapanpenyelenggaraanpemilu	Provinsi Riau	60 org	150.000.000	APBD		60 org	150.000.000
		09	Fasilitasi Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan bagi calon pemilih pemula	TersosialisasinyaPendidikanbagical onpemilihpemula	Pekanbaru	350 org	300.000.000	APBD		350 org	250.000.000

			11	Pendidikan Budaya Politik Bagi Elemen Masyarakat.	Pemahamanbudayapolitik di masyarakat	Provinsi Riau	225 org	275.000.000	APBD		225 org	600.000.000
			12	PendidikanBudayaPolitikbagiPartai Politik	Pemahamanbudayapolitik di masyarakat	Provinsi Riau	300 org	275.000.000	APBD		300 org	600.000.000
			13	Monitoring &Suvervisi persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak kabupaten kota	Monitoring &Suvervisi persiapan Kab/kota	Kampar dan Pekanbaru	2 kab/kota	165.000.000	APBD		2 kab/kota	0
19	2	28		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi				750.000.000				1.100.000.000
			01	Identifikasi Ketahanan Ekonomi, Sumber Daya Alam, terkait Kewaspadaan Nasional se-Provinsi Riau	Data KetahananEkonomidanSumberdaya Alam	Provinsi Riau	12 kab/kota	200.540.000	APBD		12 kab/kota	0
			02	Pemantauan Perkembangan Harga terkait kewaspadaan nasional	Tersedianya data PerkembanganHargadanKetersediaanSembako di Daerah	Provinsi Riau	12 kab/kota	173.500.000	APBD		12 Kab/kota	100.000.000
			03	Forum Koordinasi Peningkatan Peran Pemda dalam Pembentukan Lembaga Ekonomi di Daerah	Berkembangnya lembaga-lembaga ekonomi daerah	Provinsi Riau	12 kab/kota	200.000.000	APBD		12 kab/kota	250.000.000
			04	Forum dialog Konflik Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam	terlaksananya forum dialog KonflikSumberDayaEkonomidanSumberDayaAlam	Provinsi Riau	12 kab/kota	200.000.000	APBD		12 kab/kota	250.000.000
			05	PendataanSumberDayaAlam yang BerpotensikonflikdalamrangketahananEkonomi	Tersedianya Data SDA yang berpotensiKonflikdalamrangketahananekonomi	Provinsi Riau	12 kab/kota	219.000.000	APBD		12 kab/kota	0
19	2	29		Program Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan				2.080.000.000				2.120.000.000
			01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama	Penguatankelembagaan Forum KerukunanUmatBeragama (FKUB) di Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 keg	250.000.000	APBD		1 keg	270.000.000
			02	Fasilitasi Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi dan kabupaten/Kota	Pendataan danEvaluasiOrmas/LSM se Provinsi Riau	Provinsi Riau	12 kab/kota	150.000.000	APBD		12 kab/kota	300.000.000
			03	Pembinaan Ormas dan LSM di Provinsi Riau dan Kab/Kota	PemahamanpengurusOrmas/LSM dalammenjalankanaktivitasnya	Provinsi Riau	12 kab/kota	200.000.000	APBD		12 kab/kota	500.000.000

			06	Fasilitasi Pertemuan Tokoh adat, kesultanan dan Ormas Kebudayaan Provinsi Riau	Terfasilitasinya pertemuan tokoh adat, Kesultanan dan Ormas Kebudayaan Provinsi Riau	Provinsi Riau	150 org	150.000.000	APBD		150 org	250.000.000
			07	Koordinasi Identifikasi Aliran Sempalan di Provinsi Riau	Terdatanya Aliran Sempalan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	150 org	180.000.000	APBD		150 org	200.000.000